

BAB II

KERJASAMA *SISTER - CITY* OSAKA DAN SAN FRANCISCO, SEJARAH ISU WANITA PENGHIBUR DAN KOMUNITAS JARINGAN ADVOKASI *COMFORT WOMEN JUSTICE COALITION*

Bab II dalam penelitian ini akan spesifik membahas gambaran umum dan sejarah dari sejumlah objek yang diteliti, diantaranya kerjasama *sister – city* Osaka – San Francisco, komunitas jaringan advokasi berbasis kesetaraan gender, isu wanita penghibur dan komunitas *Comfort Women Justice Coalition* itu sendiri.

Bab II akan terdiri atas enam bagian, bagian pertama akan menjabarkan sejarah terbentuknya kerjasama *sister-city*, bagian kedua akan membahas sejarah terciptanya hubungan kerjasama antara San Francisco dengan Osaka dan apa saja agenda yang telah tercipta diantara kedua negara selama enam puluh tahun menjalani hubungan kota kembar. Bagian ketiga akan menjelaskan sejarah perjuangan gerakan advokasi berbasis kesetaraan gender di tingkat internasional. Bagian keempat akan menjabarkan sejarah isu wanita penghibur, apa yang dialami oleh para penyintas selama ditawan oleh tantara Jepang dan bagaimana isu ini diadvokasi di tingkat internasional. Bagian kelima akan menjabarkan sejarah terbentuknya *Comfort Women Justice Coalition*, dan agenda yang mereka lakukan dalam memperjuangkan isu wanita penghibur di berbagai negara. Bagian keenam merupakan kesimpulan.

2.1 Sejarah Kerjasama *Sister – City*

Perkembangan dinamika sistem internasional telah menciptakan berbagai jenis hubungan internasional yang diterapkan dalam berbagai lingkungan, mulai dari tingkatan regional, hingga internasional. Semenjak perang dingin berakhir dan era globalisasi menjadi bentuk dinamika yang paling eksis dalam masyarakat internasional, kerjasama dan interdependensi menjadi lebih relevan dalam banyak hubungan yang diciptakan oleh berbagai aktor, baik negara dengan negara, negara dengan aktor non negara maupun negara dengan masyarakat. Berakhirnya perang dingin, juga telah merubah paradigma keamanan internasional dari yang sebelumnya berpusat pada konflik ideologi antara blok barat dan blok timur, meluas pada isu keamanan masyarakat. Manifestasi dari perubahan paradigma ini adalah perluasan definisi keamanan masyarakat yang dulunya dipandang sebagai urusan internal sebuah negara, menjadi urusan yang memerlukan kerjasama dengan negara lain baik dalam tingkat bilateral, maupun multilateral (Perwita, 2014).

Globalisasi, dan penghapusan batas-batas teritorial juga menjadikan ancaman dari negara lain secara militer yang merupakan bagian dari keamanan tradisional, tidak lagi menjadi ancaman tunggal. Peter Chalk, dalam bukunya *International Relation and Globalization* menyatakan bahwa dunia internasional diwarnai oleh fenomena kontemporer dimana interaksi dalam sistem internasional berada dalam fenomena abu-abu (*Grey Area Phenomena*). Fenomena ini ditandai dengan adanya ancaman terhadap keamanan dan stabilitas nasional internasional dihasilkan oleh interaksi yang datang dari lebih banyak aktor, baik aktor negara dan juga aktor non negara (Perwita, 2014).

Perluasan interaksi aktor, menjadikan isu-isu yang mengemuka juga semakin beragam, keamanan masyarakat saat ini didefinisikan sebagai pemenuhan hak-hak manusia, seperti kelestarian lingkungan, budaya, sosial, isu ekonomi, hingga demokrasi. Perubahan isu dan perluasan keterlibatan aktor ini dikenal dengan *Changing Responsibility Of Security* yang menghasilkan perlindungan terhadap nilai-nilai baru, menggemuknya kelompok komunal serta berbagai bentuk baru dari interaksi dalam hubungan internasional, salah satu diantaranya dikenal dengan paradiplomasi. (Alvarez, 2020)

Paradiplomasi merupakan istilah yang baru dalam dunia hubungan internasional. istilah ini merujuk pada kerjasama internasional yang melibatkan aktor diluar pemerintah pusat, atau bersifat “*non central governments*”. Istilah paradiplomasi pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan bernama Panayotis Soldatos yang berasal dari wilayah Basque, Spanyol. Kebijakan paradiplomasi dijalankan oleh sub wilayah seperti pemerintah daerah, yang melakukan kerjasama dalam rangka memenuhi kepentingan tertentu secara spesifik. Salah satu diantara wujud kebijakan paradiplomasi yang banyak dijalankan dalam misi kerjasama pembangunan internasional adalah program kota kembar atau yang biasa dikenal dengan *sister city* (Aldecoa, 2013).

Sister city merupakan bentuk kerjasama antar dua negara yang berupa kemitraan jangka panjang antara dua wilayah di tingkat kota, kabupaten atau negara bagian. Satu kota sangat mungkin untuk memiliki beberapa kerjasama kota kembar, dan melibatkan lebih dari sekedar aktor pemerintah dalam kerjasama tersebut.

Kerjasama *sister city* umumnya melibatkan aktor yang inklusif, seperti masyarakat, pihak swasta, organisasi nirlaba, organisasi sipil hingga pelaku ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan program *sister city* yang umumnya memiliki cakupan program yang luas, serta isu yang strategis dan menjadi permasalahan dan kebutuhan di dua negara yang bekerjasama (Sister Cities International, 2022).

Kerjasama kota kembar atau *sister city* lahir sebagai bentuk adaptasi terhadap interkoneksi antar warga global, yang semakin meningkat. Kerjasama ini diinisiasi oleh kemunculan peran unit sub- negara pada tingkat provinsi dan kota, yang menjalin kerjasama dengan aktor lokal atau nasional dari negara lain. Pada awal proliferasi kota kembar di tahun 1950, banyak agenda yang bermunculan seperti kerjasama dalam penyelenggaraan festival olahraga, pertukaran budaya, penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama seperti perjanjian antara universitas terpisah dan studi dari program luar negeri. *Sister city* pertama yang terjalin di dunia adalah *sister city* antara Kota Voix Du Nord Perancis dengan Kota Keighley Inggris (Zelinsky, 1991).

Hingga saat ini kerjasama kota kembar terus dikembangkan di banyak negara, dengan berbagai macam agenda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing – masing kota yang bekerjasama. Aktor yang dilibatkan dalam kerjasama paradiplomasi ini juga semakin meluas dan melibatkan partisipasi aktor non pemerintah. Perluasan globalisasi yang menghapus batas teritorial wilayah juga telah mendorong kemudahan aktor publik untuk terlibat serta memberikan lebih banyak variasi pada kegiatan yang dapat dilakukan.

2.2 Gambaran Umum *Sister city* Osaka – San Francisco

Sister city Osaka dan Fransisco terjalin sejak tahun 1957, saat San Francisco dipimpin oleh Walikota George Christopher. Osaka merupakan kota pertama yang memiliki kerjasama *sister city* dengan San Francisco. Program ini dimulai San Francisco saat menjalankan salah satu program besar Amerika Serikat yang ditujukan untuk pembangunan keadaan politik dan ekonomi setelah sejumlah kerugian akibat Perang Dunia II. Agenda ini adalah program kamar dagang. Kerjasama kota kembar dimulai saat Kamar Dagang San Francisco dan Asosiasi Perdagangan Dunia melakukan kunjungan ke Pameran Dagang Jepang atau (*Japan's Trade Fair*) di tahun 1956 (Oda, 2017).

Ketertarikan San Francisco untuk mendatangi Jepang diinisiasi kemajuan pesat dari perekonomian Jepang dalam satu dekade pasca berakhirnya perang dunia kedua, dengan pertumbuhan ekonomi senilai sepuluh persen. Peluang pertumbuhan ini dilihat San Francisco sebagai kecocokan dengan wilayahnya yang mendapatkan empat puluh hingga enam puluh sen dari setiap satu dolar pendapatan dari aktivitas perdagangan luar negeri (Oda, 2017).

Dalam pertemuan kamar dagang yang dilakukan, San Francisco diwakili secara resmi oleh John Bolles, yang bertugas sebagai Wakil Ketua Komite Pengembangan Industri sementara itu Pemerintah Kota Osaka diwakili oleh Walikota Mitsuji Nakai. Setahun setelah perjanjian kamar dagang ini ditandatangani, San Francisco dan Osaka menandatangani kontrak atau *memorandum of understanding* dari kerjasama kota kembar San Francisco - Osaka

secara resmi. Program kerjasama kota kembar yang dijalankan dibagi atas program pendidikan seperti pertukaran pelajar, pertemuan klub dan komunitas, konservasi budaya seperti pameran, parade, pagelaran seni sandiwara hingga politik. *People to people diplomacy* dimulai dengan melibatkan banyak *stakeholder* masyarakat, seperti para pebisnis dan organisasi bisnis, pelajar dan mahasiswa hingga komunitas sosial (Besser, 1982).

Semenjak tahun pertama kerjasama berlangsung Osaka dan San Francisco mengintegrasikan kegiatan kamar dagang dengan festival budaya dan Osaka secara resmi mengundang San Francisco dalam setiap kegiatan festival tersebut. Kerjasama perdagangan menjadi agenda terbesar yang dilaksanakan oleh San Francisco dan Osaka bahkan Jepang mendapatkan kantor promosi perdagangan terbesar yang ada di wilayah Pasifik Amerika Pada tahun 1957 yang kemudian diberi nama *Japan Trade Center* atau JETRO yang diresmikan hanya beberapa bulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani (Jhonson, 1982).

Gambar 2.1 Pertemuan Walikota San Francisco Osaka dalam Kegiatan Jetro



Sumber: San Francisco – Osaka Sister City Association, 2009

Surat kabar *Nichi Bei Times*, memberitakan bahwa Kepala Kantor *Japan Trade Center*, Sugi, mengatakan bahwa perdagangan Osaka dan San Francisco adalah hal yang sangat dihargai kedua negara, dan akan ada kerjasama yang jauh lebih besar yang dapat meningkatkan volume perdagangan internasional di antara dua kota. Sebagai bentuk keseriusan dalam pengembangan perdagangan, Osaka melibatkan lebih dari sekedar pemimpin wilayah mereka. Osaka melibatkan sejumlah tokoh yang berkemungkinan besar akan berpengaruh dalam kerjasama perdagangan seperti Pemimpin Kelompok Bisnis Pusat Perhotelan lokal dan Internasional, Yayasan Masyarakat Asia dan anggota *world trade agreement* di luar keanggotaan Jetro. Bukan hanya dalam bidang perdagangan yang umumnya melibatkan masyarakat dewasa, seperti pebisnis dan pemerintah, afiliasi Osaka- San Francisco juga sampai pada para pelajar. Atas seruan dari Davies sebagai kepala afiliasi San Francisco - Osaka, *San Francisco Youth Association* (SFYA), yang merupakan perwakilan dari komunitas pemuda dan pelajar sekolah menengah mengadakan peringatan pekan pemuda yang kemudian dikenal dengan Hari San Francisco – Osaka (Oda, 2017).

Dalam peringatan tersebut, para siswa sekolah menengah menampilkan tarian dan nyanyian tradisional Jepang dalam program televisi publik, selain itu pemuda SFYA juga melakukan pemajangan boneka khas Jepang di berbagai pusat perbelanjaan. Pelajar sekolah menengah San Francisco juga merekam ucapan dan sambutan hangat mereka terhadap anak anak Osaka, untuk ditampilkan oleh Pemerintah Osaka di sekolah yang ada di wilayahnya (Oda, 2017).

Kerjasama kota kembar ini kemudian berkembang dan memiliki banyak agenda pertukaran budaya selama beberapa dekade kerjasama. Keintiman kerjasama semakin terlihat dengan mudahnya akses berbagai aktor yang terlibat dalam melakukan kunjungan ke masing - masing wilayah dan membangun agenda. Keintiman juga ditunjukkan dengan meningkatnya arus afiliasi masyarakat sipil dan menjadikan San Francisco sebagai salah satu wilayah di Amerika Serikat yang ramah terhadap penduduk asia. Sepanjang abad ke 20, San Francisco lekat dengan identitas baru sebagai kota Amerika Serikat yang sangat digemari penduduk asia dan masyarakat asia membuat komunitas di dalamnya. Diaspora masyarakat ini telah berhasil membentuk destinasi *Chinatown* sebagai salah satu wilayah yang tidak terpisahkan dari daftar kunjungan menarik di wilayah San Francisco. Pada 1876, seorang jurnalis Amerika, menulis bahwa mengunjungi San Francisco tanpa melihat kawasan komunitas asia sama dengan mengunjungi Roma tanpa melihat Paus (Malandra, 2022).

Untuk menghormati aliansi yang dimiliki oleh San Francisco dengan kota - kota di wilayah Asia dan Amerika Latin, San Francisco mengadakan *Pacific Festival* yang diperingati dengan sejumlah pagelaran budaya seperti peragaan busana, tarian tradisional serta pameran produk daerah dari seluruh kota afiliasi San Francisco. Dalam rangkaian festival tersebut juga dilaksanakan peringatan Hari *Sister city* Pasifik, untuk mewakili persahabatan San Francisco dengan seluruh afiliasi nya (Oda, 2017).

Sebagai satu - satu nya kota kembar yang dimiliki San Francisco pada tahun 1958, Osaka diberikan penghormatan khusus melalui sejumlah tindakan, diantaranya diberikannya dua lentera persahabatan kepada Osaka dan dua lentera raksasa khas Jepang yang ditaruh di gedung resmi perayaan dilakukan, San Francisco juga memutar lagu kebangsaan Jepang, Konsul Jenderal Jepang juga hadir untuk merepresentasikan Osaka dalam menerima sejumlah penghargaan San Francisco. Dalam banyak kegiatan pada hari berikutnya, sejumlah perwakilan Osaka seperti kontingen keamanan maritim beserta enam kapal perang Osaka tampil dalam sejumlah kegiatan yang menunjukkan penghormatan tinggi dari pemerintah San Francisco terhadap hubungannya dengan Kota Osaka (Ferrel, 2022).

Bahkan pada peringatan lima puluh tahun kerjasama antara Osaka dan San Francisco, Pemerintah wilayah San Francisco mengubah jalan yang bernama Buchanan, menjadi *Osaka Street*. Selain itu sebagai bentuk penerimaan masyarakat San Francisco terhadap diplomasi publik ini, terdapat sebuah restoran Jepang, bernama Suki-yaki yang sangat terkenal di wilayah teluk, dan dijadikan salah satu restoran yang paling direkomendasikan oleh pemandu wisata San Francisco kepada turis. Berbeda dengan beberapa restoran China dan Asia lainnya yang umumnya hanya dikunjungi masyarakat etnis, Suki-yaki ramai dengan warga asli San Francisco (Ferrel, 2022).

Gambar 2.2 Buchanan Street, San Francisco, Japan Town



Sumber: Fog City Secrets, 2009

Bentuk lain kedekatan hubungan antara Pemerintah San Francisco dengan Pemerintah Jepang adalah Festival Bunga Sakura San Francisco yang rutin diadakan setiap tahun dan sudah diselenggarakan semenjak tahun 1968. Festival ini dilakukan setiap Bulan April saat memasuki musim semi dan Bunga Sakura dalam keadaan mekar sempurna. Festival ini dilakukan di wilayah *Japantown* dari Kota San Francisco. Selain di *Japantown*, Sakura sangat mudah dijumpai di wilayah teluk (Bay Area), seperti Taman Hucane, Jembatan Bay Bridge dan Taman Hayward (Festival, 2023).

Bukan hanya dalam festival, kerjasama kota kembar telah menghasilkan banyak tempat yang dapat dikunjungi masyarakat apabila ingin melihat kebudayaan Jepang di wilayah San Francisco, diantaranya adalah Lindley Meadow sebuah area terbuka hijau di *Golden Gate Park*, *San Francisco Botanical Garden's Tempelate Asian Garden* yang menyajikan pagoda dan *Ochaya* (rumah teh khas Jepang) serta di *Japanese Cultural and Community Center*. Untuk meningkatkan intensitas kerjasama di antara kedua kota, San Francisco dan Osaka membentuk asosiasi

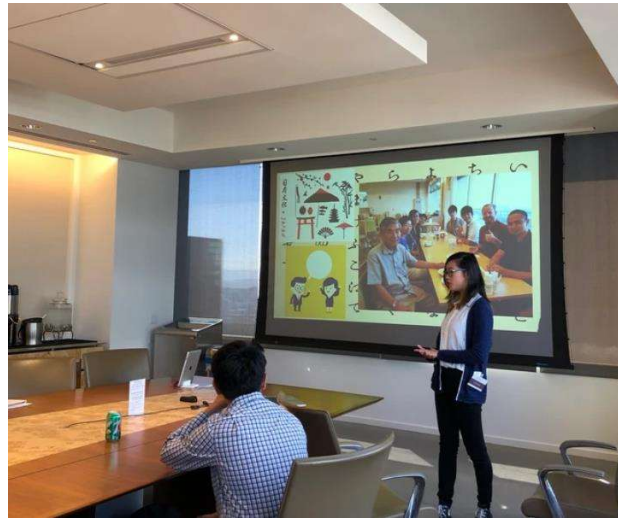
kerjasama yang dikenal dengan *San Francisco - Osaka Sister city Association*. Asosiasi ini berjalan dengan sangat baik dan melibatkan berbagai pihak dari sektor publik kedua negara seperti *Japan Airlines, Nippon Travel Agency of America, Osaka University, Port Of San Francisco, San Francisco Office of Civic Engagement and Immigrant, Squire Patton Boggs LLP, Union Bank dan Yorozu Law Group* dan sejumlah sektor swasta lainnya (Association, 2017).

Mengikuti perkembangan kerjasama pada abad 21, Osaka dan San Francisco tidak hanya menyelenggarakan kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun pariwisata namun juga pada kerjasama pendidikan. Dalam kurun waktu 2018, sebelum kerjasama berakhir pada bulan Oktober, Osaka dan San Francisco masih terlibat dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Kegiatan pertukaran pelajar ini dikenal dengan *San Francisco - Osaka Students Ambassador* (Manurung, 2022).

Di Osaka, program *students ambassador*, dimulai dengan rangkaian Osaka - San Francisco *Sister city Association President's Award* yang berupa *annual speech contest* yang diselenggarakan untuk seluruh *High School Students* Osaka. Pemenang tahunan dari kompetisi ini akan mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke wilayah San Francisco dengan pembiayaan Pemerintah Osaka dan San Francisco serta mendapatkan fasilitas penginapan di wilayah *Bay Area* serta sejumlah tur budaya di wilayah San Francisco. Sementara itu siswa San Francisco juga terlibat dalam program yang sama, pemenang dari kegiatan *speech contest* berbahasa Jepang akan diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Osaka selama

tiga minggu dengan pendanaan Pemerintah Osaka - San Francisco. Diluar dari kegiatan pendidikan, setahun sebelum hubungan berakhir pada tahun 2017, sejumlah delegasi San Francisco masih melakukan perjalanan ke wilayah Osaka Jepang, dan mendapatkan sambutan dengan dibuatnya *Osaka Way* (Carey, 2019).

Gambar 2.3 Osaka - San Francisco *Students Ambassador Program*



Sumber: San Francisco – Osaka Sister City Association, 2016

Secara umum kerjasama Osaka – San Francisco yang telah terjalin selama enam puluh tahun mendatangkan manfaat bagi kedua kota, melibatkan banyak aktor baik aktor pemerintah maupun non – pemerintah serta berjalan dengan harmonis. Meskipun pada awalnya hanya bergerak dalam bidang ekonomi, kerjasama kedua kota meluas pada bidang lainnya seperti budaya dan pendidikan. Hasil dari perluasan ini dapat dilihat dari keberadaan kawasan khusus wilayah asia atau yang dikenal dengan *Chinatown* di San Francisco, kunjungan pejabat San Francisco secara rutin ke Osaka serta sejumlah fasilitas dan agenda simbolik lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Osaka – San Francisco berjalan dengan harmonis,

dan berpusat pada pengembangan budaya dan ekonomi serta tidak diintervensi oleh kepentingan politik yang berkemungkinan menjadikan hubungan diantara keduanya mengarah pada tujuan politik tertentu.

2.3 Sejarah Jaringan Advokasi berbasis Perjuangan Kesenjangan Gender dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

Isu perempuan termasuk dalam salah satu isu yang memiliki banyak kelompok advokasi transnasional maupun kelompok advokasi lokal. Advokasi ini dimulai pada abad ke -18 dengan berdirinya sejumlah aktivis perempuan yang berfokus pada pergerakan politik, budaya dan ekonomi dengan kampanye utama untuk menghapuskan diskriminasi gender. Salah satu momen penting yang menandai kemunculan gerakan advokasi perempuan pada abad ke 18 terjadi di wilayah Amerika. Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott menginisiasi gerakan *Seneca Falls Convention* yang merupakan konvensi hak perempuan pertama di Seneca Falls, New York, pada tahun 1848. Konvensi ini merupakan konvensi yang memicu banyak agenda lain di wilayah Amerika maupun wilayah Eropa lainnya (Rupp, 1994).

Di wilayah Eropa, khususnya Negara Prancis, terdapat gerakan *La Voix de Femmes* atau *Voice of Women* yang mengadvokasi sejumlah isu seperti partisipasi wanita dalam militer, persamaan busana antara perempuan dan laki - laki, kesamaan peran dalam rumah tangga antara perempuan dan laki - laki, hingga penolakan terhadap pembatasan perempuan dalam ruang privat. Sementara itu di Negara Inggris, muncul gerakan *London Society for Women Suffrage* yang muncul pada

pertengahan tahun 1850 an hingga 1860 an, kelompok ini bergerak dalam advokasi hak politik, hak pendidikan dan hak kelas pekerja. Empat belas tahun berikutnya, pada 1874, muncul *Women's Trade Union League* yang memperjuangkan kesepakatan yang adil antara majikan dan buruh perempuan serta konsumen, kelompok ini juga secara resmi berafiliasi dengan Partai Buruh Inggris (Rupp, 1994).

Gerakan ini menandai kemunculan dan penyebaran advokasi perempuan pada ranah yang lebih luas. Pada tahun 1888 dalam momen peringatan empat puluh empat tahun konvensi hak perempuan Seneca Falls, kelompok advokasi perempuan Amerika membentuk *International Council Women* (ICW) sebagai gerakan feminis yang memiliki orientasi advokasi internasional, dua diantara pendiri penting kelompok ini adalah Susan B Anthony dan Elizabeth Cady Stanton. Maggie Humm dan Rebecca Walker membagi sejarah pergerakan advokasi feminisme menjadi tiga gelombang pergerakan. Advokasi pertama terjadi pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 yang berfokus pada kampanye hak pilih perempuan dan kesempatan perempuan untuk berpolitik baik dipilih maupun memilih. Advokasi ini menghasilkan *Convention on the Political Rights of Women* yang disahkan pada tahun 1952 (Rampton, 2015).

Gelombang advokasi kedua dimulai pada tahun 1960 an yang berfokus pada kampanye hak - hak hukum dan sosial budaya perempuan. Gelombang kedua ini diinisiasi oleh perkembangan revolusi industri yang mendorong feminis untuk memperjuangkan hak ekonomi perempuan. Gelombang ketiga berlangsung dalam

tempo waktu yang cukup cepat, pada 1990-an, advokasi gelombang ketiga berfokus pada perjuangan terhadap kegagalan advokasi kedua, termasuk pada nilai-nilai yang jauh lebih progresif, seperti hak perempuan terhadap otoritas tubuhnya, hak reproduksi, hak aborsi, perawatan prenatal dan keputusan penggunaan kontrasepsi, hak terhadap perlindungan perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga, hak untuk mendapatkan kenyamanan di tempat kerja seperti cuti haid dan hamil dan melahirkan, perlawanan terhadap praktik misogini dan hak diskriminasi gender lainnya (Rampton, 2015).

Perjuangan yang dilakukan oleh advokasi feminisme umumnya dilakukan melalui sejumlah gerakan yang terarah, dan menjadi pola berulang pada banyak gerakan perempuan setelahnya. Salah satunya adalah advokasi gelombang pertama melalui *American Equal Rights Association* (NAWSA) yang didirikan pada tahun 1848 dengan fokus amandemen peraturan negara bagian agar memberikan hak pilih pada perempuan dan di tahun 1890 Wyoming menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang memberikan hak pilih ini. Selain itu advokasi gelombang pertama juga diwarnai dengan kehadiran *International Coalition Women* (ICW) untuk mengimbangi dominasi laki-laki pada ranah politik elektoral dan memberikan kesempatan lebih pada wanita. Melalui advokasi gelombang pertama ini feminisme berhasil mengklaim dukungan dari 4 hingga 5 juta perempuan di seluruh dunia baik dari ICW maupun organisasi di luarnya (Singh, 2018).

Pada 1913 Elizabeth Cady Stanton, Susan B Anthony dan Carrie Chapman Catt membentuk aliansi dengan fokus isu dan jaringan yang lebih inklusif dikenal

dengan *International Women Suffrage Alliance* (IWSA). Walaupun didirikan oleh wanita Amerika, IWSA memiliki banyak keanggotaan, delegasi dan aliansi di berbagai negara. Hingga 1914, IWSA memiliki dua puluh empat afiliasi di banyak wilayah, kecuali wilayah Amerika Latin. Wilayah ini sendiri baru dijangkau pada tahun 1922. Namun perjuangan ini belum sepenuhnya menjadi inklusif bagi seluruh perempuan karena perempuan berkulit hitam mendapatkan tantangan rasisme yang masih kuat dan gerakan masih cenderung kulit putih sentris. Untuk itu sejumlah aktivis wanita kulit hitam menginisiasi berdirinya *National Association Of Colored Women* (NACW) yang didirikan pada tahun 1896, dan *Alpha Suffrage Club* yang didirikan pada tahun 1913 (Carlise, 2020).

Pada feminisme gelombang kedua, teknologi dan pengetahuan sudah menyentuh perempuan. Peranan media juga sudah menjadi salah satu trend dalam persebaran kampanye feminisme, seperti keterlibatan Majalah *Time and Life* dalam penerbitan edisi khusus pembebasan hak - hak perempuan pada tahun 1970. Seiring dengan tren tersebut, sejumlah anggota advokasi perempuan mulai menulis karya tentang perjuangan perempuan seperti Betty Friedan dengan karyanya *The Feminine Mystique*. Advokasi feminisme global cukup sukses memanfaatkan pengaruh media, salah satunya di tahun 1965, Majalah *Cosmopolitan* yang sebelumnya berfokus pada aktivitas keluarga di reorientasi oleh Helen Gurley Brown menjadi majalah khusus pembebasan hak-hak perempuan dan penerimaan individualitas perempuan dalam karir dan kehidupan romantisme. Perjuangan gelombang ketiga menjadi jauh lebih inklusif, persebaran advokasi feminisme sukses menjadi advokasi transnasional yang tidak hanya berbasis di Amerika

Serikat maupun Eropa dengan kampanye perjuangan wanita kulit putih sebagai isu sentral namun telah menjadi advokasi yang lebih adil bahkan terhadap perempuan kulit berwarna (Schwarzman, 2018).

Salah satu feminisme Jepang, Eyi Koyama, menyatakan bahwa feminisme gelombang ini berfokus pada ketimpangan akses yang diperoleh perempuan dan laki-laki. Advokasi yang lebih inklusif ini juga mendorong berkembangnya banyak cabang dari gerakan feminisme diantaranya adalah feminisme liberal, feminisme hitam/perempuan, feminisme eksistensial, feminisme radikal, feminisme marxis/sosialis, ekofeminisme, feminisme postmodern dan feminisme multikultural. Jenis - jenis feminisme ini berkembang sesuai dengan kebutuhan persebaran dan terintegrasinya feminis dalam banyak golongan masyarakat dari waktu ke waktu (Dewi, 2020).

Sebagai salah satu wujud keberhasilan advokasi perempuan, pada tahun 1967 dibawah naungan persatuan bangsa - bangsa komisi status perempuan dibentuk. Setelah membentuk komisi tersebut, persatuan bangsa - bangsa secara resmi mengadakan konferensi perempuan pertama di tingkat internasional yang diselenggarakan pada tahun 1975. Komisi ini diselenggarakan di Meksiko dan merupakan wujud keberhasilan dari *sejumlah non governmental organization* yang bergerak pada advokasi perempuan. Periode tahun 1970 an disebut sebagai *International Women Years* karena berhasil memasukkan isu perempuan dalam agenda penting yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Di awal tahun 1970 an, Herta Kuusinen membentuk Federasi Demokrasi Internasional Perempuan,

pergerakan ini juga didukung oleh Pemerintah Rumania. Keberhasilan perjuangan advokasi perempuan juga ditandai dengan disahkannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) oleh Persatuan Bangsa - Bangsa pada tahun 1979. Konvensi ini relevan dengan perjuangan feminisme dan penggerak advokasi perempuan pada gelombang dua dan gelombang tiga terkait dengan kesejahteraan hak sosial perempuan, dan sudah diratifikasi oleh 177 negara hingga saat ini (Djulihardy, 2017).

Keberhasilan advokasi perempuan juga ditandai dengan peningkatan partisipasi dan kuantitas konferensi. Salah satunya dengan disahkannya *International Conference on Population and Development (ICPD)* pada tahun 1994. Pada akhir abad 20 an ini, konvensi keempat pada isu perempuan dilaksanakan di Beijing pada empat sampai lima September 1995. Konvensi ini menjadi salah satu konvensi paling berpengaruh, *Beijing Platform For Action* yang disahkan pada tahun 1995 tersebut memuat sejumlah dokumen penting dan strategis terkait pemberdayaan dan kemajuan perempuan, penegakan hak asasi manusia, serta organisir diri dan kebebasan untuk memilih berbagai alternatif tindakan dan keputusan dalam kehidupan sosial. Keputusan yang dihasilkan dari konvensi Beijing ini juga memberikan pengaruh pada *Millenium Development Goals* yang diselenggarakan di KTT Milenium 2000 di wilayah New York (Djulihardy, 2017).

Inklusivitas feminisme telah muncul sebagai pemahaman yang banyak mendorong keberanian perempuan di berbagai negara untuk menyuarakan hak mereka, dan membentuk sejumlah jaringan advokasi dengan berbagai tujuan, salah

satu diantaranya adalah perjuangan terhadap hak - hak perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual dalam masa perang dunia kedua, yang menginisiasi sejumlah feminis untuk membentuk jaringan advokasi *Comfort Women Justice Coalition*, gerakan ini sesuai dengan tujuan kampanye feminisme gelombang dua, tentang hak wanita untuk tidak mendapatkan pelecehan seksual.

2.4 Sejarah Isu Wanita Penghibur (*Comfort Women*)

Masalah wanita penghibur merupakan isu yang membahas mengenai hak para korban pelecehan seksual oleh militer Jepang pada masa perang dunia kedua. Para korban umumnya berasal dari negara bekas jajahan Jepang seperti Indonesia, China, Filipina, Belanda, Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, Timor Leste, Hong Kong serta Macau dan Korea Selatan. Para wanita ini diculik dan dijadikan budak seksual oleh Jepang dengan alasan untuk menaikkan strategi militer Jepang seperti pemeliharaan stamina tentara dan peningkatan moral dan kepercayaan diri tentara (Ruiz, 2020).

Selama periode tersebut terdapat sekitar 400.000 wanita dan anak-anak dari berbagai negara yang ditawan oleh tentara dan perwira Jepang dengan disponsori langsung oleh Kekaisaran Jepang. Penawanan ini dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan dan di luar dari hak asasi manusia sehingga banyak diantara perempuan tersebut menderita secara fisik seperti tertular penyakit seksual, infeksi dan penderitaan psikologis hingga banyak diantaranya yang memilih untuk bunuh diri. Sebagian yang mati dalam kamp tawanan juga tidak dikuburkan dengan layak, serta

tawanan yang sakit juga tidak diberikan pengobatan maupun dikembalikan kepada keluarganya (Ruiz, 2020).

Gambar 2.4 Empat Wanita Korea Selatan yang dibebaskan oleh Pasukan Aliansi Amerika Serikat - China, di Provinsi Yunan setelah kekalahan Jepang



Sumber: Association for Asian Studies, 2019

Stasiun kenyamanan merupakan bangunan yang digunakan oleh para tentara Jepang untuk melakukan aksi kekerasan seksual. Aksi ini awalnya dilakukan pada sejumlah wanita penghibur yang datang secara sukarela dari wilayah Jepang, namun pada tahun 1930 -an Jepang mulai memaksa penduduk lokal untuk melayani mereka di stasiun tersebut. Penggunaan stasiun ini secara langsung diawasi dan dioperasikan oleh Pemerintah Jepang yang berarti Pemerintah Jepang secara sadar melakukan tindakan ini. Salah satunya adalah klausul yang diterapkan di stasiun Huayue – Lou di Nanjing, pada Enam Maret 1939 yang menyaratkan pemeriksaan kesehatan wanita, hingga jadwal dan biaya yang diterapkan terhadap para perwira militer Jepang dalam melakukan aksi kekerasan seksual tersebut (Bisland, 2019).

Gambar 2.5 Stasiun Kenyamanan Shanghai, China



Sumber: Japan Focus, 2007

Mulai awal 1938, perekrutan ini dilakukan dengan mengirim sejumlah calo yang berasal dari wanita Jepang atau lokal untuk merekrut sejumlah anak gadis dari petani miskin. Gadis-gadis ini ditipu dengan dijanjikan bahwa mereka akan dijadikan perawat, pekerja binatu, pekerja dapur ataupun pekerja pabrik yang digaji oleh Pemerintah Jepang. Gadis – gadis ini kemudian akan dikirimkan ke wilayah perang seperti di China dan Taiwan untuk menjadi budak seksual dari tentara Jepang, tidak dibayar dan diperlakukan secara semena – mena. Pada akhir perang dunia kedua, Militer Jepang menggunakan polisi mereka untuk merekrut gadis – gadis muda dengan pemaksaan yang lebih kejam. Bahkan sebelum dijadikan tawanan seksual, para wanita ini disiksa seperti ditendang dan dipukuli hingga kehilangan kesadaran. Saat di kamp tahanan perang, para wanita ini mendapatkan lebih banyak penyiksaan, mereka bahkan harus melayani enam puluh tentara dalam sehari. Peraturan terkait pemeriksaan kesehatan yang semula ada sama sekali tidak berlaku lagi. Seiring dengan eskalasi perang, dana yang dimiliki Jepang untuk hal tersebut mulai dipangkas dan dialihkan pada persediaan krusial militer seperti

persediaan senjata dan makanan para prajurit. Pada posko yang terletak di sejumlah garda depan, perempuan – perempuan lokal penghibur diperkosa tanpa pengawasan yang ketat serta tidak adanya persediaan kondom yang mencukupi dan meskipun tersedia para tantara mulai enggan menggunakannya dan tenaga medis kewalahan dengan peningkatan jumlah penyakit menular seksual serta mulai malas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para tawanan (Bisland, 2019).

Keengganan para tenaga medis menjadikan tantara Jepang menggunakan cara yang tidak aman agar para wanita penghibur tidak menularkan penyakit kepada mereka. Militer Jepang memaksa para gadis tawanan seksual untuk disuntik dengan Salvarsan atau Zat Arsphenamine sebuah zat berbasis arsenic yang digunakan untuk mencegah penyakit Sifilis. Akibat pemberian zat ini banyak wanita Jepang mengalami sebuah penyakit serius seperti kemandulan (Bisland, 2019).

Selama periode penawanan untuk dijadikan budak seksual, Militer Jepang melakukan penyiksaan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia. Wanita ini akan dibunuh apabila mereka berani keluar dari kawasan dari stasiun dan kamp tersebut. Seorang penyintas dari Korea yang bernama Ok – Sun Yi, pernah berusaha untuk melarikan diri dari stasiun dan kemudian dia ditusuk pada bagian lengan dan kakinya. Selain itu para wanita ini juga banyak yang dibunuh saat melakukan perlawanan selama aktifitas seksual yang kasar bahkan beberapa wanita yang menderita penyakit seksual yang parah dan dikhawatirkan akan menularkan penyakit seksual akan dibunuh secara paksa oleh Pemerintah Jepang. Pembunuhan ini juga umumnya dilakukan di depan umum atau disaksikan oleh para tawanan

seksual Jepang lainnya agar para rekan dari tawanan tersebut mendapatkan efek jera. Beberapa diantara mereka yang tidak tahan dengan penyiksaan tersebut memilih untuk bunuh diri. Tidak sedikit juga dari mereka yang mati karena kelaparan akibat minimnya persediaan logistik selama di kamp. Mereka yang meninggal selama di kamp tahanan tidak pernah dikuburkan oleh pemerintah Jepang dan dibiarkan hingga membusuk (Qiu, 2013).

Selain penyiksaan secara fisik, para wanita tawanan ini juga mengalami penghilangan identitas, mereka diberikan nama Jepang dan dilarang untuk berkomunikasi dalam Bahasa Korea atau bahasa negara mereka. Para wanita ini juga dilarang untuk berkumpul dan diminta untuk duduk secara terpisah selama perjalanan menuju wilayah kamp dan diawasi ketat dalam interaksi di wilayah stasiun dan kamp untuk mencegah mereka melakukan perencanaan melarikan diri. Bahkan para wanita juga dipaksa untuk melayani para tantara dan militer tersebut di luar stasiun seperti di tenda – tenda darurat saat serangan musuh mengalami eskalasi. Selain meninggal akibat penindasan yang sangat kejam, para wanita ini juga meninggal akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam atau turut menjadi sasaran musuh selama perang baik disengaja maupun terkena bom, serangan udara dll (Stetz, 2003).

Selain di wilayah Taiwan dan China, Militer Jepang juga melakukan aksinya di wilayah Indonesia. Pemerintah Jepang bukan hanya memilih warga lokal, melainkan juga sejumlah wanita Belanda yang menjadi miskin atau keluarganya menjadi tawanan pasca Jepang berhasil merebut kekuasaan di

wilayah tersebut. Selain di wilayah Indonesia, Militer Jepang juga melakukan aksi perekrutan wanita penghibur di wilayah Filipina. Seperti yang terjadi di wilayah Korea, wanita – wanita ini tidak diperkenankan untuk berbicara satu sama lain. Dalam perang yang terjadi di Bosnia pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan ini kembali dilakukan, hal ini membuat para penyintas wanita yang merupakan korban tentara Jepang berafiliasi dan bersatu untuk membentuk advokasi perempuan, sejumlah perjuangan dilakukan dengan mendapatkan perhatian dari kelompok advokasi Amerika Serikat (Tanaka, 2002).

Sejumlah tindak kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tentara Jepang selama periode perang dunia kedua telah mendorong para penyintas dari sejumlah negara, seperti Korea, Filipina, China dan Taiwan berani menyuarakan penderitaan mereka di tingkat internasional dan menjadi awal mula terbentuknya gerakan advokasi wanita penghibur.

2.5 Gambaran Umum *Comfort Women Justice Coalition*

Merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan hak perempuan dalam perlawanan terhadap kekerasan seksual, tindakan seksisme, rasisme, militerisasi terhadap perempuan, kolonialisme, dan perjuangan agar perempuan dan anak memiliki kehidupan yang bermartabat, dan tidak lagi dipandang sebagai warga negara kedua, serta diperlakukan dengan layak dan terhormat. Organisasi ini merupakan jaringan advokasi transnasional yang berfokus pada isu perjuangan hak mantan para wanita dan anak korban pelecehan seksual dan perdagangan manusia serta perbudakan para tentara dan pasukan militer di

bawah kekaisaran Jepang pada periode 1932 - 1945. Berdirinya organisasi ini diinisiasi untuk memperjuangkan kembali kampanye global dari perjuangan keadilan dan reparasi bagi para mantan wanita penghibur di zaman ekspansi Jepang, dimana sebelumnya kampanye ini pernah disuarakan oleh Kim Hak Soon, salah satu mantan wanita penghibur asal Korea Selatan pada awal tahun 1990 an. Setahun kemudian, kampanye ini kemudian diikuti oleh wanita Korea lainnya, mereka mengajukan gugatan hukum untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang (Yoo, 2023).

Gambar 2.6 Logo Komunitas *Comfort Women Justice Coalition*



Sumber: Remembercomfortwomen.org, 2015

Masalah wanita penghibur lebih dari sekedar perjuangan terhadap penistiaan dari aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh elit tantara Jepang terhadap wanita tawanan mereka selama penjajahan dan perang, namun berkaitan dengan isu ekonomi, budaya, politik dan permasalahan sosial yang lebih luas. Kampanye global pada tahun 1990 an tidak berhasil memberikan daya advokasi yang besar, karena berbenturan dengan respon Pemerintahan Jepang yang mencoba

untuk merestrukturisasi kembali sejarahnya. Hingga saat ini Jepang masih memiliki *track dan record* yang sangat buruk dalam kesetaraan gender dan menjadi negara dengan peringkat 144 dalam hak kesetaraan gender. Bahkan dalam studi yang dilakukan oleh Universitas Internasional Osaka hingga tahun 2018 terdapat 150 kasus pelecehan yang dialami oleh perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan, media dan polisi (Mar, 2016).

Penyangkalan sejarah ini bahkan menjadi salah satu program pemerintah yang sangat diperhatikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe selama menjabat. Penyangkalan ini telah menjadi kampanye global, dimana Jepang meminta seluruh penulis dan penerbit buku yang ada di wilayah Amerika Serikat untuk melakukan revisi terhadap tulisan dan terbitan mereka tentang wanita penghibur, dan menghapuskan bahasan tersebut dari kurikulum sejarah di sekolah dan buku - buku bacaan. Penyangkalan ini mendapatkan reaksi pro dan kontra di masyarakat, sebagian kelompok militer Amerika Serikat dan kelompok pemerintahan, tidak memberikan banyak respon terhadap upaya Pemerintahan Jepang untuk melakukan perubahan sejarah dari bahasan wanita penghibur, hal ini berkaitan dengan kepentingan aliansi Amerika Serikat dengan Jepang, dan kepentingan Amerika Serikat terhadap perlawanan dan perimbangan kekuatan China dan Korea Utara sebagai dua negara yang bagi kepentingan politik Amerika Serikat dapat membahayakan status unipolar Amerika Serikat dalam politik dunia (Ushiyama, 2021).

Sebagian kelompok pemerintahan dan militer wilayah Amerika Serikat, merasa urgensi untuk mempertahankan keberadaan Amerika Serikat di wilayah Asia melalui Jepang, lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ikut mengadvokasi isu tersebut. Namun sebagai negara yang memiliki banyak penduduk progresif, beberapa diantara warga dan wilayah Amerika Serikat turut membantu advokasi, masyarakat yang kontra terhadap penyangkalan ini mencoba untuk mengorganisir gerakan mereka dalam komunitas dan advokasi yang lebih terstruktur. Sesungguhnya terdapat sembilan gerakan yang menyuarakan isu wanita penghibur, salah satunya adalah *Comfort Women Justice Coalition* (Jung, 2021).

Comfort Women Justice Coalition didirikan oleh Jeff Adachi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kehormatan bersama dengan Pendeta Amos C. Brown, dan Karen Korematsu. Organisasi ini didirikan pada tahun 2015, dengan salah satu basis gerakan organisasi di wilayah San Francisco. Organisasi ini bersifat multinasional dengan jangkauan agenda bersifat transnasional. *Comfort Women Justice Coalition* saat ini diketuai oleh Lilian Sing, dan Julie Tang, namun dua tokoh tersebut bersifat sebagai dewan pengawas, karena sudah memasuki masa pensiun secara struktural. Secara keorganisasian, kelompok advokasi ini dipimpin oleh Judith Markinson selaku dewan presiden. Di Bawah struktur presiden, terdapat jabatan sekretaris yang dipegang oleh Phyllis Kim, dan Bendahara Linda Quan. *Comfort Women Justice Coalition* juga memiliki sejumlah aliansi dan organisasi mitra, diantaranya adalah, *Academic Council of the Indo Project Alliance for Preserving the Truth of Sino-Japanese War*, *American Friends Service Committee*, *Asian Americans for Peace & Justice*, *BAYAN – USA*, *Brightline Defense*, *Center*

for Political Education and Anakbayan East-Bay, Children of the Gulf War' – US Project, Chinese American Association of Commerce, Code Pink, Eastbay Vietnam War Veterans Association, East Point Peace Academy clipse Rising, Filipina Women's Network, Global Alliance for Preserving the History of WWII in Asia, Grandmothers for Peace, Japan-U.S. Feminist Network for Decolonization, Japan Multicultural Relief Fund, (Japantown) Korean Senior Center, Korean American Chamber of Commerce, US, Korean American Forum of California, National Lawyers Guild, Nikkei for Civil Rights and Redress-LA, No Nukes Action Committee, Occupy Action Council, One Billion Rising, One Heart for Justice, Rape of Nanjing Redress Coalition, Religious Society of Friends (Quakers), Solidarity International, Japan, Veterans for Peace, San Francisco, Women Cross DMZ, Women for Genuine Security, Women International for Peace and Freedom.

Sebagian besar organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, dan advokasi perempuan. Disamping itu beberapa diantaranya merupakan organisasi komunitas masyarakat Asia, seperti masyarakat China, Korea Selatan dan masyarakat Jepang yang bermukim di wilayah California dan Amerika Serikat (Comfort Women Justice Coalition, 2020).

Beberapa agenda yang telah dilakukan oleh *Comfort Women Justice Coalition* adalah pendirian monumen wanita penghibur di sejumlah wilayah, seperti San Francisco, dan Philadelphia. Sebelumnya Patung *Comfort Women* terlebih dahulu ada di wilayah Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan. Organisasi ini juga secara aktif melakukan kampanye berbasis advokasi lokal dan transnasional terhadap sejumlah isu, seperti memperingati Pembantaian Nanjing ke 85,

menerbitkan pernyataan terhadap peristiwa politik Jepang yang berkaitan dengan isu wanita penghibur dengan agresif, seperti menerbitkan artikel tentang sistem patriarki yang dianut oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan implementasinya dalam penghilangan isu wanita penghibur dalam buku - buku pelajaran dan pendidikan, yang diterbitkan di hari kematian perdana menteri tersebut. Selain itu *Comfort Women Justice Coalition* juga secara aktif mengadvokasi pemerintahan San Francisco untuk memasukkan materi wanita penghibur dalam kurikulum pendidikan (Comfort Women Justice Coalition, 2020).

Gambar 2.7 Kampanye *Comfort Women Justice Coalition* di San Francisco



Sumber: Hankyoreh, 2016

Semenjak didirikan pada 2015 lalu, *Comfort Women Justice Coalition* telah memiliki sejumlah aliansi, dan agenda yang berfokus terhadap isu wanita terutama wanita penghibur. Komunitas ini secara aktif melakukan kampanye pembelaan hak wanita penyintas kekerasan seksual perang dunia kedua dan menyuarakan kampanye tandingan terhadap pengabaian dan upaya peningkaran sejarah yang dilakukan oleh Pemerintahan Jepang.

2.6 Kesimpulan

Kerjasama kota kembar San Francisco – Osaka berjalan dengan baik dan meluas dari sekedar agenda ekonomi menjadi agenda pendidikan dan budaya. Salah satu bentuk kerjasama yang paling nyata terlihat adalah dibangunnya sejumlah monumen, taman, dan fasilitas publik lain yang bercirikan kebudayaan Jepang di wilayah San Francisco maupun program pertukaran pelajar rutin yang dilakukan melalui agenda *speech contest* oleh kedua negara.

Namun kerjasama ini, kandas dengan adanya Monumen *women comfort*, Monumen yang diinisiasi oleh *Comfort Women Justice Coalition*, sebuah komunitas advokasi transnasional yang berfokus pada permasalahan hak wanita penghibur yang mendapatkan penyiksaan dan perbudakan seksual yang sangat kejam dari tentara Jepang selama perang dunia kedua, dan dilegalkan oleh Pemerintahan Jepang. Gerakan ini didirikan pada tahun 2015, oleh Jeff Adachi dan bermarkas di California, Amerika Serikat. Komunitas ini memiliki sejumlah agenda dan aliansi yang meluas di seluruh wilayah Amerika Serikat, terutama California.